



REVOLUSI MENTAL TERHADAP PARA PELAKU PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

Oleh: Replita*

Abstract

The construction of the perpetrator mentality pattern adheres top down, often ignores 's rights "of the people as beneficiaries of the development, the main. Rural communities are less understand the development about meaning. All the powers which the government with often plays the role hearts forms of behavioral aberrations, such as skimming development funds, the reporting that shaped fictitious. Development divert , and so on. It initials occurs due from the number of the souls development actors Yag not healthy again.

Kata Kunci: Revolusi Mental, Pelaku Pembangunan, Pedesaan

*Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, alumni Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas, Padang

A. Pendahuluan

Model pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama ini cenderung menggambarkan model top down, dimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan dan sekaligus pelaku dalam pembangunan tersebut. Masyarakat kurang berperan dalam mengusulkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan, sehingga sering menghasilkan pembangunan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah bisa menggunakan dana dengan bebas, tanpa menghiraukan aspek moral sehingga pembangunan tersebut kurang mengindahkan kualitas, dan hasilnya kurang bagus. Oleh karena itu hasil pembangunan sering dirusak oleh masyarakat. Untuk itu mental pelaku pembangunan seperti di atas perlu mendapat perubahan yakni dengan mengadakan revolusi mental para pelaku pembangunan tersebut.

Pembangunan masyarakat desa sering sekali mendapat permasalahan, baik permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat maupun masalah yang datangnya dari pemerintah. Dimana masyarakat di satu sisi sering meganggap bahwa pembangunan itu mutlak dilaksanakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak peduli dengan pembangunan tersebut, demikian halnya pemerintah terkadang kurang memperdulikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam membangun desa sering melaksanakan sesuai selera mereka, bahkan dengan kesewenangannya mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan pembangunan. Akibatnya pembangunan yang dilaksanakan kurang membawa manfaat bagi masyarakat, dan pada prinsipnya masyarakat merasa tidak memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga hasil dari pembangunan tersebut sering dirusak oleh masyarakat karena mereka kecewa, dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka.

Kondisi pembangunan di pedesaan pada kenyataannya sering menghasilkan situasi yang kurang menguntungkan misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial dan melemahkan kapital sosial yang ada di dalam masyarakat seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan, dan lain-lain. Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk megatasi persoalan bersama. Kondisi sosial kapital masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pemerintah sebagai pelaku pembangunan yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan, sehingga mengakibatkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di dalam masyarakat.

Dengan demikian mental para pelaku pembangunan perlu menapat perhatian dengan mengadakan revolusi mental, yang bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan menjadi tepat guna bagi masyarakat.

B. Pengertian Revolusi Mental

Istilah mental adalah segala sesuatu yang menyangkut cara hidup atau cara berfikir dan cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai, meyakini, cara berperilaku dan bertindak. Namun kerap muncul anggapan bahwa mental hanyalah urusan batin yang terkait dengan sifat tindakan ragawi dan ciri fisik benda-benda dunia, dan *daya* –daya mental pun dibentuk dan menghasilkan perilaku serta tindakan ragawi. Kelenturan mental merupakan kemampuan untuk mengubah cara berfikir, cara memandang, cara berperilaku, bertindak juga dipengaruhi oleh hasrat (campuran antara emosi dan motivasi).¹ Mental pelaku pembangunan yang perlu di revolusi adalah termasuk kerapuhan tentang penegakan kejujuran dalam mengelola pembangunan yakni adanya korupsi. Dimana Coralie Bryant Louise G. White yang diterjemahkan oleh Darodjatun Kuntjoro Jakti yang mengutip pendapat Myrdal tentang korupsi, dimana korupsi merupakan bagian penting dalam kondisi umum negara-negara yang belum berkembang sebagai negara lunak. Jadi korupsi itu adalah ganjalan pokok dan menimbulkan hambatan-hambatan serius, tidak hanya para politisi dan administrator yang terpengaruh oleh menyebarluasnya korupsi, melainkan juga para usahawan, dan seluruh penduduk.² Jadi dengan korupsi dapat menggerogoti stabilitas politik karena membuat rakyat kehilangan rasa hormat kepada pemerintah, sehingga mengakibatkan timbulnya kemerosotan akhlak.

Tekanan-tekanan yang kuat dan sistemik dalam kasus korupsi sudah membuat para administrator yang bertugas di lapangan merasa tidak berdaya. Bahkan ada kecendrungan bahwa masyarakat menjadi sangat rentan, dan merasa ditelantarkan oleh para pelaku pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses pemerintahan daerah harus berjalan sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang ada, meliputi tugas-tugas otonomi, tugas pemerintahan umum pusat dan daerah tugas-tugas pembantuan yang dalam bentuk formalnya dapat dibedakan sebagai tugas perencanaan proyek-proyek APBD dan perencanaan proyek –proyek Inpres dan perencanaan swadaya masyarakat.

Sampai saat ini pengertian perencanaan proyek belum duduk pada posisi yang sebenarnya karena secara langsung disamakan dengan usulan proyek. Oleh karena itu kegiatan perencanaan di setiap Dinas dan Kanwil adalah kegiatan perencanaan dan kegiatan musiman menyusun Daftar Usulan Proyek.

Akibatnya bahwa di unit organisasi yang lebih rendah tidak ada kegiatan yang kontiniu menginventarisasi berbagai masalah dan kegiatan untuk disusun dalam suatu daftar prioritas proyek atas pertimbangan keterkaitan manfaat. Keadaan ini perlu diperbaiki agar semua unit kerja di semua tingkatan secara kontiniu menyusun perencanaan di bidangnya masing-masing. Hal ini tidak hanya berguna bagi dinas yang bersangkutan, tetapi akan merupakan informasi

¹Yudi Latif, *Keharusan Mental*, (Jakarta,: Kompas, 12 Juni 2014), hlm. 99.

²Coralie Briant da Louise G. White, *Terj. Darodjatun Kuntjoro Jakti, manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, (Jakarta: LP3ES, 1989), , hlm. 210

bagi perencanaan umum untuk di NHI. 70 atau Bappenas serta menjadi sumber dari penyusunan usulan proyek.

Rencana-rencana pembangunan pedesaan, disusun untuk setiap tingkat pemerintahan, mulai dari wilayah atau propinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa. Namun rencana-rencana tersebut tidak pernah jelas. Meskipun pembangunan seringkali dijanjikan dengan model pembangunan partisipatif, tetapi hal itu sering menjadi kacau, karena jarang sekali rencana-rencana tersebut tidak terlaksana.

Rencana pembangunan, proyek dan program hampir semuanya ditujukan bagi masyarakat desa yang miskin dan golongan sosial yang rawan. Program yang dilaksanakan para birokrasi di pemerintahan sering mempunyai reputasi kurang berhasil.

Ketetapan tentang harga-harga sering terabaikan oleh pemerintah, padahal harga-harga hasil pertanian masyarakat akan membuat pendapatan masyarakat meningkat. Tetapi yang sering terjadi hasil-hasil petani ditentukan harganya oleh agen-agen yang membuat mengalirnya sebagian besar pendapatan masyarakat desa ke kota-kota dalam bentuk monopoli pemasaran yang memberikan keuntungan besar kepada pengelola pasar atau pemerintah dan agen-agen, sementara keuntungan untuk masyarakat sangat rendah, akan tetapi bahan untuk barang-barang kebutuhan pokok dan sarana pertanian hasil produksi kota harganya sangat tinggi. Padahal mengubah harga pasar sehingga menguntungkan para petani produsen di pedesaan adalah kewenangan pemerintah.

Kebijakan hukum dan peraturan sering juga terabaikan oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya penting dilaksanakan karena potensi untuk meningkatkan nasib masyarakat miskin melalui kebijakan tentang undang-undang *land-reform*, yang menyangkut syarat tentang sewa menyewa tanah, mengatur batas luas lahan yang boleh dimiliki. Jadi dengan undang-undang *land reform* dan peraturan tentang suku bunga, manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung oleh golongan masyarakat miskin. Apalagi jika harga komoditi pertanian yang cenderung menurun bila musim panen tiba, sehingga mengakibatkan sedikitnya penghasilan petani.

Gambaran mental seperti di atas sering digambarkan oleh para pelaku pembangunan. Hal ini menunjukkan perilaku yang kurang sehat mental, atau adanya gangguan kejiwaan. Dimana gangguan kejiwaan merupakan kumpulan dari keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan kejiwaan maupun jasmani. Keabnormalan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, tetapi penyebabnya adalah adanya gangguan kejiwaan.

Program kegiatan sering digerakkan oleh politik bukan oleh kebijakan, dimana dalam membuat suatu program, maka pemimpin politik harus membuat koalisi yang cukup luas untuk menyetujui Rencana Undang-undang dan menyisihkan dana. Dengan demikian terdapat tekanan yang konstan untuk menjadikan segala sesuatu program untuk semua orang, sampai saat suatu RUU

melewati proses legislative, sasaran semula sering dimentahkan sehingga menjadi tidak berarti, dan sering beberapa program saling bertentangan antara program yang satu dengan yang lainnya.

C. Rencana Aksi Tata Kepemerintahan yang Lebih Baik

Rencana aksi tata pemerintahan yang lebih baik, bertujuan mengidentifikasi resiko potensi dan langkah –langkah penanganan di luar system pengendalian baku yang diterapkan oleh Bank.

Rencana aksi anti korupsi harus dilihat sebagai titik awal dan bukan suatu daftar lengkap dan semua langkah-langkah mitigasi anti korupsi yaitu:

1. Pemetaan Korupsi : matriks yang dicantumkan dalam rencana aksi ini mengidentifikasi beberapa resiko korupsi dan merumuskan beberapa langkah-langkah penanganan korupsi.

Rencana aksi yang dilakukan dimana strategi anti korupsi dikembangkan untuk dua tataran yang berbeda, yakni satu pada tataran pusat sebagai instansi yang bertanggung jawab, dan satu lagi tataran masyarakat sebagai penerima manfaat program dan juga sebagai satuan pelaksana sebagai sub proyek. Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi keberhasilan proyek. Secara bersama-sama, factor tersebut akan mendorong akuntabilitas yang lebih besar serta tata pemerintahan yang lebih baik.

Proyek memberdayakan masyarakat untuk mengelola sub proyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun hasilnya pada tingkat desa. Disain proyek mempertimbangkan secara cermat sosialisasi dan teknik manajemen yang transparan sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi dan pemberdayaan yang diperlukan. Partisipasi aktif dan anggota masyarakat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan sub-proyek. Selain itu, program menyediakan dana wakaf tunai yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat, misalnya melalui rekening lembaga yang ada dalam masyarakat yang dipercayai. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, dana dikirim dari rekening khusus dalam beberapa hari. Format standard an sederhana digunakan untuk mencatat dan melaorkan penggunaan dana. Penyederhanaan ini mengurangi perlunya keterampilan khusus yang juga membuat system lebih transparandan dapat dipertanggung jawabkan, melalui partisipasi aktif, lebih besar kemungkinan masyarakat menginginkan

Pelayanan dari pemerintah dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumberdaya yang sudah diperuntukkan sehingga tercapai manajemen yang efektif dan perbaikan mata pencaharian masyarakat.

Ada beberapa aspek dari rencana aksi yang perlu dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi.

Unsur ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan materi yang disajikan dan membuatnya mudah diakses melalui pusat informasi public berbasis website dan informasi public berbasis website dan informasi khusus akan disediakan bagi masyarakat melalui berbagai cara, termasuk pertemuan public dan papan pengumuman.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pengumuman mengenai rencana dan jadwal pengadaan barang dan jasa tahunan, dokumen pelelangan dan permintaan proposal.
- b. Pemberian informasi kepada semua penawar mengenai ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran harga, setelah penawar yang berhasil diumumkan.
- c. Pengumuman mengenai laporan audit.

Pengawasan oleh masyarakat, dimana program ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku pengawasan yang lebih besar, sehingga mengurangi resiko korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Program ini melibatkan tingkat partisipasi formal yang tinggi oleh kelompok masyarakat seperti penerima manfaat, sector swasta, dan pimpinan tradisional atau tokoh adat, pimpinan agama, melalui berbagai cara seperti pemantauan partisipatif, proyek atau hasil akhir, keanggotaan panitia lelang, dan evaluasi kualitas penyediaan jasa atau barang yang di beli.

LSM dan organisasi sosial masyarakat lainnya akan dilibatkan dalam berbagai cara , antara lain melalui partisipasi dalam lokakarya regional, sebagai narasumber kunci untuk pengembangan, sebagai evaluator ad-hoc dan sebagai penyedia pelatihan untuk bidang keterampilan tertentu.

2. Penanggulangan Kolusi , Penipuan dan Nepotisme.

Peluang kolusi dan penipuan berpotensi untuk ada dalam setiap proyek dimana kolusi dan penipuan serta nepotisme akan berkurang dengan adanya transparansi dan pengiklanan yang baik dari tiap lelang, apalagi dilaksanakannya audit dan tatacara pelelangan serta melakukan pengawasan oleh tenaga ahli dan pengembangan kapasitas dengan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan di tiap wilayah regional. Dalam kasus kolusi, penipuan dan nepotisme dapat dilaksanak pertama melalui rembug warga masyarakat, kemudian melaporkannya ke instansi berwenang yakni ke kantor kejaksanaan.

3. Mekanisme Penangan Pengaduan

Prosedur penangan pengaduan dengan adanya penugasan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola data base pengaduan dan tindak lanjut. Satuan penanganan pengaduan akan menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan.

4. Sanksi dan Penyelesaian

Program ini memiliki toleransi agar masyarakat didorong untuk mengenakan sanksi kepada warga yang menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan kepada mereka. Terdapat bukti bahwa sanksi semacam itu dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif daripada naskah hukum yang panjang lebar, khususnya dalam kasus korupsi yang lebih kecil. Secara formal sanksinya diterapkan juga seperti pihak pemerintah, non pemerintah, dan lain-lain. Sanksi yang diberikan dapa berupa pemutusan hubungan kontrak terkait,

mungkin dengan tambahan penalty yang dikenakan seperti denda, masuk daftar hitam, dan lain-lain, sesuai dengan peraturan Bank dan pemerintah. Penarikan dana dari rekening Khusus proyek akan ditangguhkan dalam kasus dimana diduga terjadi penyalahgunaan dana atau pada tahap berikutnya mungkin tidak diikutsertakan dalam kegiatan proyek.

Penanganan pembangunan ekonomi di pedesaan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan terwujudnya keterpaduan antara pendekatan sektoral dan partisipatif sehingga mampu mempertemukan perencanaan dalangan atas dan kalangan bawah. Mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik bertujuan untuk dapat mengidentifikasi resiko potensi dan langkah-langkah penanganan di luar sistem pengendalian.

Untuk memantapkan fungsi dan posisi pembangunan daerah pedesaan menurut Rahardjo Adisasmita yang mengungkapkan seharusnya diarahkan kepada:

- a. Pemantapan ketahanan pangan, maka peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian membutuhkan dukungan peyediaan prasarana fisik pedesaan seperti jaringan irigasi dan jalan desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit unggul dan teknologi.
- b. Penciptaan kegiatan ekonomi local secara luas.
- c. Peningkatan dan memperluas lapangan kerja.
- d. Penguatan kelembagaan pedesaan, baik kelembagaan ekonomi dan sosial.
- e. Peningkatan keswadayaan masyarakat.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat.
- g. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan.³

D. Pendapatan Penduduk Desa dan Kota

Pendapatan penduduk desa dan kota sering berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi sumber daya manusianya dan kondisi alam daerah tersebut. Di Negara Asia, pendapatan penduduk desa jauh lebih rendah dari penduduk kota. Ada beberapa hal yang menyebabkan rata-rata pendapatan penduduk kota lebih tinggi adalah:

1. Kestabilan dan kemantapan yang lebih besar dari pendapatan penduduk kota.
2. Lebih banyaknya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di kota.
3. Lebih banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota yang memungkinkan rata-rata produktivitas tenaga kerja di kota lebih tinggi.

E. Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan umumnya berlokasi di daerah pedalaman, mempunyai keterikatan yang relative kuat terhadap kehidupan tradisional. Pada

³Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 98.

masyarakat ini berlaku keteraturan-keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi keagamaan dan politik serta hukum yang coraknya sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Masyarakat setempat merupakan bagian masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah tertentu dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu pula ditandai dengan interaksi yang lebih besar antara sesama anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

Dasar utama dari masyarakat setempat ialah lokasi dan perasaan kelompok atau masyarakat setempat mempunyai tempat tinggal yang tetap serta mempunyai ikatan solidaritas yang kuat antara sesamanya sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Suatu masyarakat ditandai dengan hubungan yang sangat erat dan lebih dalam dibandingkan dengan hubungan mereka dengan orang-orang yang berada di luar desanya. Antara sesama warga sedesa masih saling kenal dan bergaul dengan dengan dekat dan rapat.

Sistem kehidupan biasanya berkelompok dan kekeluargaan dengan mata pencaharian utama bertani. Beberapa kelemahan sistem perencanaan pembangunan pedesaan masa lalu; konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah sering terabaikan, sehingga proses tawar menawar program tanpa melihat dan mempertimbangkan usulan yang muncul dari bawah. Kondisi ini terjadi dimungkinkan karena memang usulan dari bawah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat sebagai aspirasi masyarakat dari desa yang bersangkutan. Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya belum memuaskan karena tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Bidang Pembangunan Pendidikan; pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, berdasarkan hak-hak asasi manusia dan nilai agama, cultural dan pluralisme bangsa, maka pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna berdasarkan asas legalitas.

Di Indonesia dicanangkan oleh pemerintah program wajib belajar secara bertahap telah di mulai sejak dulu, seperti yang diungkapkan oleh Sudarsono bahwa pemerataan kesempatan belajar sejak tahun 1970 –an yang di mulai dari pendidikan dasar (SD) sampai ke sekolah lanjutan. Pada tahun 1994 program belajar tersebut di samping telah memperluas kesempatan belajar di SD dan SLTP juga telah mendorong perluasan pendidikan dan kesempatan belajar pada jenjang yang lebih tinggi.⁴

F. Ciri-Ciri Mental Yang Sehat.

Orang yang sehat mentalnya seperti dikutip oleh A.F. Jealani pendapat Marie Jahoda memiliki karakter utama sebagai berikut:

1. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri sendiri dengan baik.

⁴Juwarno Sudarsono,, (Pembaharuan Pendidikan Nasional, Dalam Era Reformasi, dalam Kajian Dikbud, No 069, Tahun II Juni, (Jakarta: 1998), hlm.54..

2. Pertumbuhan, perkembangan dan perwujudan diri yang baik.
3. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan dan tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi.
4. Otonomi diri yang mencakup unsure-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas.
5. Bebas dari penyimpangan kebutuhan serta memiliki empati dan kepekaan sosial.
6. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara baik⁵.

Kesehatan mental yang terganggu berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh gangguan atau penyakit mental tersebut antara lain menunjukkan rasa gelisah, iri, dengki, sedih, risau kecewa, putus asa, bimbang dan rasa marah. Dari segi pikiran dan kecerdasan gejalanya antara lain dari segi tingkah laku sering menunjukkan kelakuan yang tidak terpuji, seperti suka mengganggu lingkungan, mengambil milik orang lain, menyakiti, dan memfitnah.

H. Menerapkan Revolusi Mental terhadap para pelaku Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang berarti bahwa pembangunan mencakup kemajuan lahiriyah seperti sandang, pangan dan perumahan, dan lain-lain, kemudian kemajuan bathniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, disamping itu kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah sebagai pelaku pembangunan harus membangun sikap yakni:

- a) Beriman dan bertakwa
- b) Mencintai masyarakat dengan tulus

Mencintai diartikan yakni suatu komitmen untuk memberikan hidupnya kepada masyarakat khususnya desa yang tertinggal. Mencintai disini bukan pamanjaan artinya harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan wajar.

c. Tekun

Sifat ini sangat dibutuhkan karena mengorganisasi masyarakat bukan hanya kerja satu gebrakan (one shot operation) tetapi lebih merupakan proses berlanjut yang penuh tantangan dan kesulitan.

d. Memiliki rasa humor

Dalam mengorganisasi masyarakat seorang organisator harus memiliki tingkat humor yang cukup. Artinya dia mampu mendudukan segala sesuatu secara proporsional dan tidak terlalu menyalahkan orang lain dan mampu menerima segala kesulitan dengan tetap gembira dan tidak mudah putus asa serta tidak mudah frustasi.

e. Kreatif

⁵A.F Jaelani, Penyicilan Jiwa & Kesehatan Mental, (Jakarta: Amzah, 1997), hlm.76.

Kreativitas juga sangat dibutuhkan dalam kerja mengorganisasi masyarakat karena pada dasarnya mengorganisasi masyarakat tidak ada resep yang baku, jadi kreativitas seseorang organisator sangat dibutuhkan.

f. Fleksibel

Masyarakat juga dituntut untuk fleksibel, artinya seorang organisator harus mampu menyesuaikan diri dan rencananya dengan situasi nyata di lapangan.

g. Berpartisipasi

Partisipasi yakni pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama dan pelibatan secara suka rela oleh masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Dalam upaya membangun kesadaran suatu kelompok masyarakat dan sekaligus menata kembali tatanan sosial yang ada maka metoda yang sangat efektif adalah pembangunan partisipatif, yaitu pembangunan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukan masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama, artinya keputusan-keputusan penting yang langsung menyangkut hidup mereka sepenuhnya ada di tangan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku eksternal bukan untuk mengambil keputusan melainkan menunjukkan konsekuensi setiap keputusan yang diambil masyarakat yakni menjadi fasilitator.

Ciri-ciri partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Bersifat proaktif dan bukan reaktif artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak.
2. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat.
3. Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut
4. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.
5. Katalis pembangunan bersama masyarakat merumuskan persoalan yang dihadapi.
6. Masyarakat aktif mengambil sikap dan tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut serta menentukan cara menangani persoalan tersebut.

Daftar Bacaan:

Yudi Latif, *Keharusan Mental*, Jakarta, : Kompas, 12 Juni 2014.

Coralie Briant da Louise G. White, Terj. Darodjatun Kuntjoro Jakti, *menajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES, 1989.

A.F Jaelani, *Penyician Jiwa & Kesehatan Mental*, Jakarta: Amzah, 1997.

Juwarno Sudarsono,, (*Pembaharuan Pendidikan Nasional, Dalam Era Reformasi, dalam Kajian Dikbud, No 069, Tahun II Juni, Jakarta: 1998.*

Juwarno Sudarsono,, (*Pembaharuan Pendidikan Nasional, Dalam Era Reformasi, dalam Kajian Dikbud, No 069, Tahun II Juni, Jakarta: 1998.*